

Editor : Oki Anggara, M.Si.



FUTURE SCIENCE

DEMOKRASI

TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis :

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H. | Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos. | Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Aina Nurdianti, M.Pd. | Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.
Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc. | Emilia, S.H., M.Kn. | Dra. Darmawati, M.Pd.
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.



Bunga Rampai

DEMOKRASI: TEORETIS DAN PRAKSIS

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DEMOKRASI: TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis:

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.

Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.

Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.

Aina Nurdiyanti, M.Pd.

Asep Ikbali, S.Pd., M.Pd.

Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.

Emillia, S.H., M.Kn.

Dra. Darmawati, M.Pd.

Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.

Editor:

Oki Anggara, M.Si.



DEMOKRASI: TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis:

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Aina Nurdyanti, M.Pd.
Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.
Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.
Emillia, S.H., M.Kn.
Dra. Darmawati, M.Pd.
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.

Editor: **Oki Anggara, M.Si.**

Desain Cover: **Nada Kurnia, S.I.Kom.**

Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Ukuran: **A5 Unesco (15,5 x 23 cm)**

Halaman: **x, 224**

e-ISBN: **978-634-7216-06-9**

Terbit Pada: **Mei 2025**

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Future Science Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)**

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku bunga rampai yang berjudul **Demokrasi: Teoretis dan Praksis**. Buku ini hadir sebagai upaya akademik dalam menguraikan konsep, dinamika, serta tantangan demokrasi dalam berbagai perspektif. Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas yang ingin memahami demokrasi secara lebih komprehensif. Buku ini terdiri dari sebelas bagian yang membahas demokrasi dari aspek teoretis hingga aplikatif. Bagian pertama mengulas Demokrasi: Konsep Dasar dan Pengantar sebagai landasan utama dalam memahami sistem demokratis. Selanjutnya, perkembangan demokrasi dibahas dalam dua konteks utama, yaitu Perkembangan Demokrasi di Dunia dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia, yang menggambarkan bagaimana sistem demokrasi berevolusi dan beradaptasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, buku ini juga membahas demokrasi sebagai sebuah sistem dan cara hidup. Bab Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan dan Demokrasi sebagai Sistem Politik menguraikan bagaimana demokrasi diterapkan dalam tata kelola pemerintahan dan politik. Tidak hanya sebagai sistem, demokrasi juga dipandang sebagai nilai yang harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dijelaskan dalam bab Demokrasi sebagai Sikap Hidup dan Nilai-Nilai Demokrasi.

Keunikan buku ini juga terletak pada pembahasan demokrasi dalam perspektif historis dan filosofis, salah satunya melalui kajian Demokrasi dalam Piagam Madinah, yang menyoroti bagaimana prinsip-prinsip demokratis telah diterapkan dalam sejarah Islam. Selain itu, aspek kearifan lokal pun dibahas dalam bab Demokrasi: Perspektif Kearifan Lokal yang memberikan wawasan mengenai bagaimana konteks/isu lokal bisa menjaga sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pendidikan menjadi aspek penting dalam menjaga eksistensi demokrasi. Oleh karena itu, bab Pendidikan Demokrasi membahas bagaimana pendidikan dapat menjadi instrumen utama dalam menanamkan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda. Sebagai penutup, bab Masa Depan Demokrasi mengajak pembaca untuk merenungkan tantangan dan prospek demokrasi di tengah dinamika global dan nasional yang terus berubah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis, akademisi, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumbangsih nyata dalam penguatan demokrasi di Indonesia dan dunia.

Pontianak, Maret 2025

Editor

Oki Anggara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 DEMOKRASI: KONSEP DASAR DAN PENGANTAR....	1
Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.....	1
PENDAHULUAN	1
DEFINISI DEMOKRASI	2
FUNGSI DAN PERAN DEMOKRASI.....	3
TANTANGAN DALAM PRAKTIK DEMOKRASI.....	7
MASA DEPAN DEMOKRASI.....	11
KESIMPULAN.....	14
BAB 2 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI DUNIA DAN PERAN PEMUDA	19
Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.....	19
PENDAHULUAN	19
TANTANGAN KONTEMPORER TERHADAP DEMOKRASI.....	21
PEMUDA SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DEMOKRASI.....	26
KESIMPULAN.....	35
BAB 3 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA.....	45
Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.....	45
PENDAHULUAN	45
DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA.....	46
DEMOKRASI PADA MASA ORDE BARU	49

	DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI.....	51
	DEMOKRASI DI ERA PASCA-REFORMASI.....	52
	PROSPEK DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA DI MASA DEPAN	54
	KESIMPULAN	56
BAB 4	DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN .	61
	Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.	61
	PENDAHULUAN	61
	IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI BERBAGAI NEGARA	68
	MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM DINAMIKA GLOBAL	74
	KESIMPULAN	80
BAB 5	DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK	85
	Aina Nurdiyanti, M.Pd.	85
	PENDAHULUAN	85
	DEFINISI SISTEM POLITIK	87
	KARAKTERISTIK SISTEM POLITIK DEMOKRASI	91
	DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK	93
	TANTANGAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI	100
	KESIMPULAN	102
BAB 6	DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP	107
	Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.	107
	PENDAHULUAN	107
	INTERNALISASI DEMOKRASI: BUKAN HANYA SOAL PENGETAHUAN, TAPI JUGA SOAL SIKAP....	110

	PRINSIP-PRINSIP DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP	114
	TANTANGAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP	122
	KESIMPULAN.....	123
BAB 7	DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH	127
	Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.	127
	PENDAHULUAN	127
	SEJARAH SINGKAT PIAGAM MADINAH	129
	NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH	131
	KESIMPULAN.....	138
BAB 8	DEMOKRASI: PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL	141
	Emillia, S.H., M.Kn.	141
	PENDAHULUAN	141
	DEMOKRASI SECARA UMUM	145
	PEMBANGUNAN DEMOKRASI DESA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DALAM UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA JO. UU NO. 3 TAHUN 2024	146
	DEMOKRASI PANCASILA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL	151
	KESIMPULAN.....	155
BAB 9	NILAI-NILAI DEMOKRASI.....	159
	Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.	159
	PENDAHULUAN	159
	PERKEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI	164

	PENGARUH NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA PRAKSIS DEMOKRASI	172
	KESIMPULAN	181
BAB 10	PENDIDIKAN DEMOKRASI	187
	Dra. Darmawati, M.Pd.	187
	PENDAHULUAN	187
	PENDIDIKAN DEMOKRASI	194
	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DI INDONESIA	196
	METODE PENDIDIKAN DEMOKRASI.....	197
	TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI	199
	SOLUSI TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI	200
	KESIMPULAN	201
BAB 11	MASA DEPAN DEMOKRASI	205
	Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.....	205
	PENDAHULUAN	205
	PRAKTIK PSEUDO-DEMOCRACY DI INDONESIA ..	208
	DEMOKRASI PROSEDURAL VS DEMOKRASI SUBSTANSIAL DI INDONESIA.....	211
	KESIMPULAN	216

BAB 1

DEMOKRASI: KONSEP DASAR DAN PENGANTAR

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
Universitas Surakarta
E-mail: bintara.sp@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani "*dēmokratía*" yang berarti "pemerintahan rakyat," adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini telah berkembang dan beradaptasi selama berabad-abad, mengakomodasi berbagai bentuk dan praktek dalam masyarakat yang berbeda. Dalam memahami konsep dasar dan pengertian demokrasi, esensial untuk mengeksplorasi berbagai dimensi yang mempengaruhi interpretasi dan implementasinya dalam konteks kontemporer.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dahl (1989) dalam karyanya "*Democracy and its Critics*," demokrasi melibatkan beberapa kriteria utama, termasuk partisipasi efektif, pemahaman yang merata, dan kontrol atas agenda. Kriteria-kriteria ini membantu dalam memastikan bahwa pemerintahan benar-benar mewakili dan menjalankan keinginan rakyat (Dahl, 1989). Selanjutnya, Held (2006) menggambarkan bagaimana model demokrasi parlementer dan presidensial beroperasi dalam konteks yang lebih luas, mengemukakan perbedaan struktural dan fungsional yang signifikan antarkeduanya yang mempengaruhi efektivitas demokrasi itu sendiri (Held, 2006).

Pada Bab ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek demokrasi, mulai dari definisinya, peran, hingga tantangan yang dihadapi. Dengan memahami berbagai dimensi tersebut, kita dapat lebih mengapresiasi kompleksitas dan dinamika yang

dimiliki oleh demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang paling diidamkan namun juga paling menantang untuk diimplementasikan secara efektif.

DEFINISI DEMOKRASI

Demokrasi adalah konsep yang kaya dan kompleks dengan berbagai interpretasi yang berbeda. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi telah diartikulasikan dan ditafsirkan dalam banyak cara oleh para pemikir politik sepanjang sejarah. Definisi ini berkisar dari ide klasik tentang pemerintahan oleh rakyat hingga interpretasi yang lebih modern yang meliputi aspek hukum, hak-hak individu, dan keadilan sosial. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan demokrasi:

1. Demokrasi sebagai Pemerintahan oleh Rakyat

Aristoteles, yang dikenal sebagai salah satu filsuf pertama yang mendokumentasikan prinsip-prinsip pemerintahan, menggambarkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana "kekuasaan dipegang oleh rakyat". Menurut Held (2006), definisi ini menekankan pada partisipasi langsung warga dalam membuat keputusan politik yang mempengaruhi mereka. Held menjelaskan bahwa ini adalah ciri khas dari demokrasi langsung, seperti yang dipraktikkan dalam beberapa bagian dari Yunani kuno (Held, 2006).

2. Demokrasi sebagai Sistem Kebebasan dan Keadilan

Robert Dahl, seorang teoretikus politik modern, menawarkan pandangan yang lebih terstruktur tentang demokrasi dalam karya-karyanya. Dahl (1989) mendefinisikan demokrasi melalui konsep "*polyarchy*", di mana demokrasi dioperasikan melalui pluralisme politik, pemilihan umum yang bebas dan adil, dan hak asasi yang luas termasuk kebebasan berekspresi dan asosiasi. Menurut

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, J. (2004). "Co-Governance for Accountability: Beyond 'Exit' and 'Voice'." *World Development*, 32(3), 447-463.
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). "ICT, Public Values and Transformative Government: A Framework and Programme for Research." *Government Information Quarterly*, 31(1), 119-128.
- Barber, B. (1984). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. University of California Press.
- Bellow, A. (2003). *In Praise of Nepotism: A Natural History*. Doubleday.
- Boix, C. (2003). *Democracy and Redistribution*. Cambridge University Press.
- Boulianne, S. (2015). "Social Media Use and Participation: A Meta-analysis of Current Research." *Information, Communication & Society*, 18(5), 524-538.
- Bovens, M. (2007). *Public Accountability*. Oxford University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its Critics*. Yale University Press.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Farrell, D. M. (2011). *Electoral Systems: A Comparative Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Fishkin, J. S. (2009). *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. Oxford University Press.

- Franklin, M. (2004). *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945*. Cambridge University Press.
- Gerring, J., Thacker, S. C., & Moreno, C. (2005). "Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry." *American Political Science Review*, 99(4), 567-581.
- Gibson, R. K., Lusoli, W., & Ward, S. (2008). "The Internet and Political Participation in Europe." *European Journal of Communication*, 23(4), 451-469.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Stanford University Press.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Keane, J. (2013). *Democracy and Media Decadence*. Cambridge University Press.
- Layman, G. C., Carsey, T. M., & Horowitz, J. M. (2006). "Party Polarization in American Politics: Characteristics, Causes, and Consequences." *Annual Review of Political Science*, 9, 83-110.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Lincoln, A. (1863). "The Gettysburg Address." [Pidato, Gettysburg, Pennsylvania, 19 November 1863].
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). "Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities." *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16-42.
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. John W. Parker and Son.
- Mudde, C. (2004). "The Populist Zeitgeist." *Government and Opposition*, 39(4), 541-563.

- Norris, P. (2014). "Why Electoral Integrity Matters." Cambridge University Press.
- North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press.
- Pappas, T. S. (2019). Populism and Liberal Democracy: A Comparative and Theoretical Analysis. Oxford University Press.
- Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Belknap Press.
- Rodrik, D. (2000). "Institutions for High-Quality
- Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
- Rothstein, B. (2011). The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. The University of Chicago Press.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

BAB 2

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI DUNIA DAN PERAN PEMUDA

Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Pusat Riset Kependudukan – Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), Jakarta
E-mail: Norm002@brin.go.id

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, demokrasi global mengalami kemunduran yang signifikan, sebuah fenomena yang dijuluki "Resesi Demokrasi". Laporan Varieties of Democracy Institute (V-Dem Institute) menunjukkan bahwa jumlah negara dengan sistem otokrasi tertutup kini untuk pertama kalinya dalam dua dekade melebihi jumlah negara demokrasi liberal di dunia dan secara signifikan terjadi di Eropa Timur serta Asia Selatan dan Tengah (Nord et al., 2024). Tren ini ditandai dengan kebangkitan rezim otoriter yang secara sistematis melemahkan *checks and balances*, seperti pembatasan kebebasan pers dan intervensi terhadap lembaga peradilan. Populisme yang mengedepankan retorika divisif juga turut mempercepat polarisasi masyarakat, sementara kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi—seperti partai politik dan parlemen—terus merosot (McCoy et al., 2018; Oyebola & Aroyehun, 2024). Kombinasi faktor ini menciptakan lingkaran setan yang mengancam stabilitas sistem demokratis di berbagai belahan dunia.

Rezim otoriter modern tidak lagi muncul melalui kudeta militer klasik, melainkan melalui pemilihan umum yang dimanipulasi atau amendemen konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Contoh nyata terlihat di Hungaria di bawah Viktor

Orbán, di mana UU "Anti-LGBTQ+" dan pengambilalihan media independen digunakan untuk memusatkan kekuasaan (Novak, 2020). Di Turki, Recep Tayyip Erdoğan memberangus oposisi dengan tuduhan terorisme (Sudrajat, 2018), sementara di Brasil, Jair Bolsonaro merusak legitimasi pemilu melalui narasi konspirasi (tempo.co, 2022). Praktik semacam ini mengikis prinsip demokrasi dan menormalisasi pelanggaran hak asasi manusia sebagai alat kontrol politik. Akibatnya, ruang partisipasi publik semakin menyempit, dan masyarakat sipil dipaksa bekerja dalam bayang-bayang represi.

Populisme menjadi katalis lain dalam resesi demokrasi, terutama melalui janji-janji simplistik yang mengeksploitasi ketidakpuasan publik terhadap elit politik. Pemimpin seperti Rodrigo Duterte di Filipina dan Narendra Modi di India menggunakan narasi "Rakyat versus Elit" untuk membenarkan kebijakan otoriter, seperti pembungkaman kritik melalui UU Penghinaan atau Sensor Internet (Lozada, 2023; Soni, 2021). Namun, alih-alih menyelesaikan ketimpangan, retorika ini justru memperdalam polarisasi dan mengalihkan perhatian dari akar masalah seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi. Populisme juga melemahkan dialog rasional, menggantikannya dengan politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan agama, etnis, atau kelas sosial (Auerbach, 2021; Rheindorf, 2020).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi berada di titik nadir. Laporan Edelman Trust Barometer 2023 mengungkapkan bahwa hanya 42% warga di negara demokrasi yang percaya pada pemerintah mereka. Krisis ini dipicu oleh kegagalan elit politik dalam mengatasi masalah struktural, seperti ketimpangan ekonomi yang melonjak pasca-pandemi COVID-19. Di sisi lain, disinformasi yang menyebar melalui media sosial memperburuk ketidakpercayaan ini. Misalnya, kampanye *fake news* tentang kecurangan pemilu di Amerika

struktural ini, demokrasi hanya akan menjadi mimpi yang terasa semakin jauh.

Masa depan demokrasi tergantung pada kemampuan untuk memberdayakan pemuda sebagai arsitek perubahan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memadukan pendidikan politik yang memberdayakan, teknologi yang bertanggung jawab, dan kebijakan yang inklusif. Gerakan seperti *#FridaysForFuture* dan *#ReformasiDikorupsi* telah menunjukkan bahwa pemuda tidak takut menghadapi rezim atau krisis global selama mereka diberi ruang dan sumber daya. Tantangan ke depan, seperti krisis iklim dan kebangkitan AI atau bahkan ancaman otoritarianisme, menuntut demokrasi yang lincah dan responsif. Hanya dengan kolaborasi lintas generasi, komitmen pada keadilan, dan keberanian beradaptasi, demokrasi bisa tetap menjadi mercusuar harapan di abad yang penuh gejolak ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2022). Meredam Suara, Membungkam Kritik Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022_FINAL_TERGERUSNYA-KEBEBASAN-SIPIL-DI-INDONESIA-3.pdf
- apnews.com. (2024, January 19). Hundreds protest in Russia over activist's being jailed. The Associated Press. <https://apnews.com/article/russia-protest-bashkortostan-putin-election-79f7aa9086bb19e3375be7e324608b0d>
- Auerbach, C. (2021). Populism as a layered system: ideological, social identity, and psychodynamic perspectives. *Journal of Critical Realism*, 20(4), 349–367. <https://doi.org/10.1080/14767430.2021.1966604>
- Bacher-Hicks, A., Goodman, J., & Mulhern, C. (2021). Inequality in household adaptation to schooling shocks:

- Covid-induced online learning engagement in real time. *Journal of Public Economics*, 193, 104345. <https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2020.104345>
- Christensen, M.-B., Hallum, C., Maitland, A., Parrinello, Q., & Putaturo, C. (2023). Survival of the Richest: How we must tax the super-rich now to fight inequality.
- CIRCLE. (2021, April 29). Half of Youth Voted in 2020, An 11-Point Increase from 2016 | CIRCLE. <https://circle.tufts.edu/latest-research/half-youth-voted-2020-11-point-increase-2016>
- civicy.org. (n.d.). Civicy. Retrieved February 8, 2025, from <https://www.civicyapp.org/about>
- Das, A., & Schroeder, R. (2021). Online disinformation in the run-up to the Indian 2019 election. *Information, Communication & Society*, 24(12), 1762–1778. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1736123>
- DemocracyLab. (n.d.). Retrieved February 8, 2025, from <https://www.democracylab.org/>
- detik.com. (2021, January 27). Kenapa Petani India Memusuhi Reformasi Agraria? <https://news.detik.com/dw/d-5350965/kenapa-petani-india-memusuhi-reformasi-agraria>
- Edelman. (2023). 2023 Edelman Trust Barometer: Global Report.
- Esen, B., & Gumuscu, S. (2023). How Erdoğan’s Populism Won Again. *Journal of Democracy*, 34(3), 21–32. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/how-erdogans-populism-won-again/>
- Eumsin, P. (2022). Economic Gap and Labor Problems Policy in a Third World Country During the Coronavirus Pandemic: Inequality of Education within the Thai Social Class Structure. *Asian Journal of Arts and Culture*, 22(1), 255605–255605. <https://doi.org/10.48048/AJAC.2022.255605>

- Foa, R. S., & Mounk, Y. (2019). Youth and the populist wave. <https://doi.org/10.1177/0191453719872314>, 45(9–10), 1013–1024. <https://doi.org/10.1177/0191453719872314>
- Han, H., & Ahn, S. W. (2020). Youth Mobilization to Stop Global Climate Change: Narratives and Impact. *Sustainability* 2020, Vol. 12, Page 4127, 12(10), 4127. <https://doi.org/10.3390/SU12104127>
- Hardt, M., & Negri, A. (2011). The Fight for ‘Real Democracy’ at the Heart of Occupy Wall Street: The Encampment in Lower Manhattan Speaks to a Failure of Representation. *Foreign Affairs*.
- Hunter, W., & Power, T. J. (2019). Bolsonaro and Brazil’s Illiberal Backlash | *Journal of Democracy*. *Journal of Democracy*, 30(1), 68–82. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/bolsonaro-and-brazils-illiberal-backlash/>
- Koestanto, B. D. (2021, March 5). ”Saya Akan Tembak Wajah Kalian”, Teror Pro-Militer Myanmar Melalui Tiktok - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/05/saya-akan-tembak-wajah-kalian-teror-pro-militer-myanmar-melalui-tiktok>
- Leberstein, S., & Christman, A. J. (2016). Occupy Our Occupations: Why. *Fordham Urban Law Journal*.
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information Communication and Society*, 17(2), 143–150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571/ASSET/CMS/ASSET/D5A508ED-79D9-4D79-B413-D97FF7E54BCB/1369118X.2013.871571.FP.PNG>

- Lozada, D. (2023). Mobilising for press freedom in Duterte's Philippines: forms and challenges. *Melbourne Asia Review*, 12. <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X12.21>
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Politics. *https://doi.org/10.1177/0002764218759576*, 62(1), 16–42. <https://doi.org/10.1177/0002764218759576>
- monitor.civicus.org. (2018, May 23). Me Too movement in South Korea sparks calls for review of defamation laws - Civicus Monitor. Civicus.Org. <https://monitor.civicus.org/explore/me-too-movement-south-korea-sparks-calls-review-defamation-laws/>
- Mzalendo. (n.d.). Retrieved February 8, 2025, from <https://mzalendo.com/>
- Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2024). Reuters Institute Digital News Report 2023. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2023-06/Digital_News_Report_2023.pdf
- Nicas, J. (2022, October 28). Win or Lose, Bolsonaro Has Destroyed Trust in Brazil's Elections. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2022/10/28/world/americas/bolsonaro-supporters-election.html>
- Nicas, J., Milhorance, F., & Ionova, A. (2022, October 25). How Bolsonaro Built the Myth of Stolen Elections in Brazil. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/25/world/americas/brazil-bolsonaro-misinformation.html>
- Nord, M., Lundstedt, M., Altman, D., Angiolillo, F., Borella, C., Fernandes, T., Gastaldi, L., Good God, A., Natsika, N., & Lindberg, S. I. (2024). *Democracy Report 2024: Democracy*

- Winning and Losing at the Ballot. <https://v-dem.net/about/funders/>
- Novak, B. (2020, December 15). Hungary Effectively Bans Gay Adoption and Expands Executive Power. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/hungary-laws-orban-gay-rights.html>
- Ostwald, K., & Hlaing, K. Y. (2021, September 31). Gerakan Pro-Demokrasi Myanmar - Kyoto Review of Southeast Asia. Kyotoreview.Org. <https://kyotoreview.org/issue-31/gerakan-pro-demokrasi-myanmar/>
- Oyebola, T., & Aroyehun, M. (2024). EVOLUTION OF DEMOCRACY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. European Journal of Political Science Studies, 7(2). <https://doi.org/10.46827/EJPSS.V7I2.1867>
- Recuero, R., Bonow Soares, F., Vinhas, O., Volcan, T., Ricardo Goulart Hüttner, L., Silva, V., & Ricardo Goulart Hüttner, L. (2022). Bolsonaro and the Far Right: How Disinformation About COVID-19 Circulates on Facebook in Brazil. International Journal of Communication, 16(0), 24. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17724>
- Rheindorf, M. (2020). Rhetorics, Discourse and Populist Politics. The Cambridge Handbook of Discourse Studies, 622–643. <https://doi.org/10.1017/9781108348195.029>
- Roberts, K. (2015). Youth mobilisations and political generations: young activists in political change movements during and since the twentieth century. Journal of Youth Studies, 18(8), 950–966. <https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1020937>
- Scheppele, K. L. (2022). How Viktor Orbán Wins. Journal of Democracy, 33(3), 45–61. <https://www-journalofdemocracy-org.translate.goog/articles/how-viktor->

- [urban-wins/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc](#)
- Shadmehr, M., & Haschke, P. (2016). Youth, Revolution, And Repression. *Economic Inquiry*, 54(2), 778–793. <https://doi.org/10.1111/ECIN.12293>
- Shetreet, S. (2014). Judicial Independence, Liberty, Democracy and International Economy. *The Culture of Judicial Independence: Rule of Law and World Peace*, 14–47. https://doi.org/10.1163/9789004257818_003
- Soni, P. (2021, December 14). Online censorship is growing in Modi's India. *Columbia Journalism Review*. <https://www.cjr.org/investigation/modi-censorship-india-twitter.php>
- statista.com. (2025, January 23). Gini Index 2023 | Statista. <https://www.statista.com/statistics/264627/ranking-of-the-20-countries-with-the-biggest-inequality-in-income-distribution/>
- Steffen, S. (2024, July 11). Fact check: Disinformation's impact on the US election. *Www.Dw.Com*. <https://www.dw.com/en/fact-check-what-role-did-disinformation-play-in-the-us-election/a-70729575>
- Stewart, A. J., McCarty, N., & Bryson, J. J. (2020). Polarization under rising inequality and economic decline. *Science Advances*, 6(50), 4201–4212. https://doi.org/10.1126/SCIADV.ABD4201/SUPPL_FILE/ABD4201_SM.PDF
- Sudrajat. (2018, June 24). Erdogan, Membungkam Pers - Merepresi Oposisi. *DetikNews*. <https://news.detik.com/internasional-utama/d-4080799/erdogan-membungkam-pers-merepresi-oposisi>
- tempo.co. (2022, July 19). Jair Bolsonaro Curiga Sistem Pemilu di Brasil Rentan Penipuan. *Tempo.Co*.

- <https://www.tempo.co/internasional/jair-bolsonaro-curiga-sistem-pemilu-di-brasil-rentan-penipuan-320980>
- voaindonesia.com. (2024, November 23). Turki Pecat Dua Wali Kota Oposisi karena Tuduhan “Terorisme.” Wwv.Voaindonesia.Com.
<https://www.voaindonesia.com/a/turki-pecat-dua-wali-kota-oposisi-karena-tuduhan-terorisme-/7874399.html>
- Wike, R., & Fetterolf, J. (2021, December 7). Global Public Opinion in an Era of Democratic Anxiety | Pew Research Center. Pewresearch.Org.
<https://www.pewresearch.org/global/2021/12/07/global-public-opinion-in-an-era-of-democratic-anxiety/>
- Woolley, S. C. (2022). DIGITAL PROPAGANDA: THE POWER OF INFLUENCERS. *Journal of Democracy*, 33(3), 115–129. <https://doi.org/10.1353/JOD.2022.0027>
- Zilliacus, H., Holm, G., & Sahlström, F. (2017). Taking steps towards institutionalising multicultural education – The national curriculum of Finland. *Multicultural Education Review*, 9(4), 231–248.
<https://doi.org/10.1080/2005615X.2017.1383810>

BAB 3

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
E-mail: d.sutrisman@lemhannas.go.id /
dsutrisman.lemhannas@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai fase dalam perkembangan demokrasiya. Perjalanan ini mencakup penerapan berbagai sistem politik, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila. Setiap fase tersebut membawa dinamika dan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang memberikan peran signifikan kepada lembaga perwakilan rakyat. Namun, ketidakstabilan politik pada periode ini mendorong perubahan menuju demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam sistem ini, terjadi sentralisasi kekuasaan yang mengurangi peran partai politik dan kebebasan berpendapat (Irawan, 2007)

Perubahan signifikan terjadi pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, di mana diterapkan demokrasi Pancasila. Meskipun berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, periode ini ditandai dengan pembatasan kebebasan sipil dan kontrol ketat terhadap media serta oposisi politik

Krisis ekonomi dan tekanan reformasi pada akhir 1990-an mengakhiri rezim Orde Baru, membuka jalan bagi era Reformasi yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan,

kebebasan pers, dan penguatan peran masyarakat sipil. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk korupsi, polarisasi politik, dan ancaman terhadap independensi lembaga yudikatif.

Dalam konteks kontemporer, kepemimpinan Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014–2024 membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia. Namun, kritik muncul terkait kemunculan kembali patronase politik, politik dinasti, dan pelemahan lembaga yudikatif selama masa jabatannya. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran akan potensi kembalinya struktur politik era Orde Baru (Reuters, 2024a). Bab ini akan mengkaji secara komprehensif perjalanan demokrasi Indonesia dari masa ke masa, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta prospek ke depan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan.

DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil. Masa Orde Lama (1945–1966) ditandai dengan dinamika politik yang signifikan, termasuk perubahan sistem pemerintahan dari republik kesatuan ke Republik Indonesia Serikat (RIS), pemberlakuan Konstitusi RIS 1949, sistem Demokrasi Liberal (1950–1959), dan akhirnya transisi ke Demokrasi Terpimpin (1959–1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Konstitusi RIS 1949

Pada akhir tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan fundamental dalam struktur negaranya. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Indonesia sepakat untuk mengganti sistem negara kesatuan menjadi

keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Ke depan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan tidak mengalami kemunduran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2004). Indonesia: Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough. Dalam M. Alagappa (Ed.), *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space* (hlm. 61–96). Stanford University Press.
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(03), 152-161.
- Feith, H. (2007). *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*. Equinox Publishing.
- Irawan, B. B. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5 (1), 54–64.
- Kompas.com. (2024, Oktober 20). Pidato Presiden Prabowo Singgung Demokrasi yang Santun tanpa Permusuhan . <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/11545621/pidato-presiden-prabowo-singgung-demokrasi-yang-santun-tanpa-permusuhan>.
- Lev, D. S. (2009). *The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics, 1957-1959*. Equinox Publishing.
- Pratikno. (1996). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(4), 1-15.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. Dalam *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 3, Nomor 2).
- Reuters. (2024a, Oktober 14). A decade of Jokowi: Indonesia's democracy icon leaves illiberal legacy, critics say. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/decade-jokowi->

[indonesias-democracy-icon-leaves-illiberal-legacy-critics-say-2024-10-14/](#).

Reuters. (2024b, Desember 13). Indonesia president suggests scrapping regional elections to cut costs. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-president-suggests-scrapping-regional-elections-cut-costs-2024-12-13>.

Reuters. (2025a, Januari 31). Bigger meals budget to add 2 pct points to Indonesia's growth, president's adviser says. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-bigger-free-meals-budget-add-2-pct-points-growth-presidents-adviser-2025-01-31>.

Reuters. (2025b, Januari 31). Indonesia's new leader expands military's role in test of fragile democracy. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-new-leader-expands-militarys-role-test-fragile-democracy-2025-01-28>.

Reuters. (2025c, Februari 7). Indonesian minister turns off the lights in government quest to cut \$19 billion. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-minister-turns-off-lights-government-quest-cut-19-billion-2025-02-07>.

Untiasari, M. P., Trisiana, A., & Fathimatuzzahra. (2021). Memaknai Demokrasi di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat terhadap Demokrasi Saat Ini). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.

BAB 4

DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
IPOSS Jakarta
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mendudukan rakyat menjadi sumber kekuasaan paling tinggi. Demokrasi mencerminkan aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Sistem ini berkembang melalui sejarah panjang dan diadopsi oleh berbagai negara dengan cara berbeda. Prinsip demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat, menjadi pilar utama yang menjaga keberlanjutannya.

Definisi Demokrasi dalam Perspektif Umum

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendudukan rakyat menjadi pemegang kedaulatan paling tinggi secara langsung ataupun berdasarkan perwakilan. Konsep demokrasi bersumber dari Yunani kuno, khususnya dari kata *demos* yang bermakna rakyat, serta *kratos* yang bermakna kekuasaan. Pada praktik modern, demokrasi didefinisikan sebagai sistem yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai urusan negara. Sebagai sistem pemerintahan yang menghormati kebebasan individu, demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut serta dalam proses politik. Demokrasi juga memberi ruang untuk tiap individu memberi kontribusi menciptakan kehidupan berbangsa yang adil dan sejahtera. Demokrasi adalah sistem

yang menjamin kebebasan individu dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik (Smith, 2023).

Di berbagai negara, demokrasi menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Sistem ini berfungsi dalam menjamin agar Hak Asasi Manusia (HAM) dihargai serta kebebasan individu dilindungi. Melalui demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan keputusan politik diambil secara transparan. Demokrasi selain dipandang sebagai sistem politik, juga sebagai budaya yang menanamkan nilai toleransi, dialog, dan kerja sama. Dalam demokrasi rakyat selain dilihat sebagai objek kebijakan, juga subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Demokrasi mencerminkan kebutuhan manusia untuk memiliki kontrol atas kehidupan politik. Dengan memberi peluang setara terhadap seluruh individu berpartisipasi dalam pemerintahan, demokrasi mendorong terciptanya lingkungan kondusif untuk inovasi dan perubahan positif. Sistem ini juga menjadi alat penting mencegah tirani dan otoritarianisme karena memberikan mekanisme untuk mengontrol kekuasaan melalui hukum dan institusi yang independen. Demokrasi menjadi simbol kebebasan dan persamaan yang diinginkan dunia.

Penerapan demokrasi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya partisipasi politik. Edukasi politik menjadi elemen krusial untuk memperkuat demokrasi. Masyarakat yang memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara akan lebih mampu berperan serta pada proses demokrasi secara efektif. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai demokrasi, masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel, sehingga demokrasi tidak hanya

generasi muda adalah kunci memastikan demokrasi hidup dan berkembang.

Adalah penting untuk memiliki mekanisme checks and balances yang dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak mengorbankan HAM. Demokrasi yang baik harus selalu menjaga keseimbangan antara melindungi HAM dan menjaga kepentingan negara atau masyarakat secara umum.

Terdapat berbagai tantangan dan ancaman pada demokrasi yang menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah mengalami perkembangan yang signifikan masa depannya tetap penuh dengan risiko. Untuk memastikan kelangsungannya diperlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi internasional untuk mengatasi ancaman ini. Keberlanjutan demokrasi akan sangat bergantung pada kemauan negara untuk melindungi prinsip dasar demokrasi dan HAM dari berbagai tantangan dan ancaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, R., Smith, J., & Taylor, L. (2021). Foundations of Democracy and Governance. *Journal of Political Studies*, 45(3), 112–135.
- Brown, T. (2021). Legal Systems as Pillars of Democracy. *International Journal of Law and Politics*, 17(4), 56–72.
- Brown, T. (2023). Threats to Democracy: A Multidimensional Approach. *Journal of Political Studies*, 55(4), 123–135.
- Chen, W., & Martinez, J. (2020). Types and Applications of Modern Democracy. *International Review of Political Science*, 38(4), 200–220.
- Garcia, L. (2020). Social Media's Double-Edged Role in Democracy. *Digital Democracy Journal*, 12(3), 112–129.
- Jones, M., & Taylor, L. (2022). Youth and Social Change in the Digital Era. *International Journal of Social Sciences*, 39(2), 78–92.

- Jones, P. (2022). The Role of Civic Education in Strengthening Western Democracies. *Democracy Studies Quarterly*, 25(2), 14–28.
- Jones, T., & Lee, S. (2022). Historical Evolution of Democracy. *Global History Journal*, 12(1), 56–75.
- Karlsson, S. (2021). Factors Contributing to the Success of Democracies. *Nordic Political Review*, 9(3), 88–101.
- Lee, S. (2024). Global Strategies for Strengthening Democracy. *Global Governance Review*, 48(1), 14–29.
- Martinez, A. (2020). Human Rights as a Pillar of Democracy. *Human Rights Quarterly*, 42(3), 567–580.
- Rahmawati, D. (2023). Direct Elections as a Reflection of Democracy in Indonesia. *Southeast Asian Political Journal*, 18(2), 43–58.
- Smith, R. (2021). The Digital Paradox: Technology and the Future of Democracy. *Journal of Information Society*, 34(2), 99–112.
- Smith, R. (2023). Democracy: A Modern Perspective. *Journal of Contemporary Political Analysis*, 50(2), 89–102.
- Taylor, P., & Wilson, K. (2024). Democracy in the 21st Century: Challenges and Opportunities. *Global Politics Review*, 29(1), 145–160.

BAB 5

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK

Aina Nurdiyanti, M.Pd.
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: ainanurdiyanti@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Sistem politik bagi setiap negara berfungsi sebagai "jantung" yang menjadi inti dari kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Apabila jantung ini mengalami kerusakan, maka kelangsungan hidup bangsa akan terancam. Demikian pula, sistem politik di Indonesia berperan sebagai inti kehidupan bangsa dan negara. Jika sistem politik ini mengalami kerusakan, maka jalannya pemerintahan Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika sistem politiknya baik, maka pemerintahan pun akan berjalan dengan baik.

Demokrasi sebagai sistem politik telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas dan dipelajari dalam ilmu politik modern. Konsep demokrasi tidak hanya mencakup mekanisme pemilihan umum, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman tentang demokrasi menjadi semakin kompleks, mengingat adanya berbagai model dan praktik demokrasi yang diterapkan di berbagai negara.

Sejak awal kemunculannya, demokrasi telah mengalami berbagai transformasi dan adaptasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Dari demokrasi langsung di Athena kuno hingga demokrasi perwakilan yang lebih umum saat ini, perjalanan demokrasi mencerminkan dinamika hubungan antara kekuasaan dan rakyat. Demokrasi

sebagai sistem politik menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam hal partisipasi dan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti korupsi dan ketidakadilan hukum harus direspons dengan baik sebagai jaminan demokrasi berjalan efektif. Membangun sistem politik demokrasi yang baik bukanlah tugas yang mudah karena memerlukan proses yang panjang dan harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini penting karena mereka adalah aset bangsa yang akan mewarisi kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Tanpa pembinaan dan pengembangan sejak awal, tidak akan terbentuk generasi yang benar-benar berkualitas sebagai harapan bangsa dan negara untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari generasi tua.

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang paling banyak dianut di berbagai belahan dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi tidak hanya mencakup mekanisme pemilihan umum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil. Demokrasi sebagai sistem politik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip dasar demokrasi tetap menjadi landasan bagi pembangunan politik yang berkelanjutan. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari demokrasi sebagai sistem politik, termasuk definisi, karakteristik, tantangan, dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

Selain itu, bab ini juga akan membahas peran institusi politik, partai politik, dan masyarakat sipil dalam memperkuat atau melemahkan sistem demokrasi. Dengan memahami berbagai elemen yang membentuk demokrasi, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya sistem politik ini dalam menciptakan

Demokrasi sebagai sistem politik juga memiliki subsistem. Tiga subsistem dalam sistem politik demokrasi terdiri dari lembaga politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Ketiga subsistem ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menjalankan demokrasi. Keterlibatan aktif dari ketiga elemen ini sangat krusial untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik, menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ketiga elemen ini menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi di suatu negara. Namun, sistem politik demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti politisasi identitas, penyebaran informasi yang salah, keterbatasan partisipasi politik, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Upaya untuk memperkuat demokrasi harus melibatkan peningkatan pendidikan politik, penguatan lembaga, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Hanya dengan cara ini, demokrasi dapat bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G., dan G. Bingham Powell, Jr. (1966). *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little Brown.
- Anderson, P. (2019). Political Participation in Modern Democracies. *Journal of Political Studies*, 45(2), 123-145.
- Anderson, P. (2022). *Political Participation and Interest Groups: A Comprehensive Overview*. New York: Routledge.
- Antari, P.E.D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*. 3(1). ISSN : 2527-6654 87

- Arbi, S. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*. 1(1). 154-175.
- Arend Lijphart. (1989). *Democratic Political Systems: Types, Cases, Causes, and Consequences*. *Journal of Theoretical Politics*. 1(33). 10.1177/0951692889001001003
- AS, Hornby. 1974. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press.
- Boix, C. (2011). Democracy, Development, and the International System. *American Political Science Review*. 105(4). doi:10.1017/S0003055411000402
- Boris, M. (2020). *Pressure Groups and Their Role in Democracy*. London: Palgrave Macmillan.
- Derrida, J. (1997). *Politics of Friendship*. London: Verso.
- Von Axel Bojanowski. (23/07/2024). Demokratie: Der fragile Sieg der Freiheit – was die Historie lehrt - WELT Reference list: Electronic sources (web publications). Retrieved 25 January, 2025, from <https://www.welt.de/wissenschaft/plus252558426/>
- Ebenstein, William. (1967). *Today Ism*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Goodin, R. E. dan Klingemann, H.D. (1996). *A New Handbook of Political Science*, New York: Oxford University Press.
- Jones, L. (2021). *The Voice of the Minority: Pressure Groups in Democratic Societies*. Chicago: University of Chicago Press.
- Johnson, R., & Lee, S. (2021). The Impact of Misinformation on Democratic Processes. *International Journal of Communication*, 15(3), 567-589.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. 34. 49-68.

- Mark Haugaard. (2010). Democracy, Political Power, and Authority. *Social Research*. 77(4) DOI: 10.2307/23347119
- Nambo, A.B & Puluwuluwa, M.R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Mimba*, XXI (2). 262 – 285.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 1(1). 1-15.
- Patton, P. (2012) *Deleuze and Politics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Roberts, J. (2021). *Government Accountability and Interest Groups: A Critical Analysis*. Los Angeles: Sage Publications.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIs*. 12 (1).
- Smith, J. (2020). Identity Politics and Its Effects on Democracy. *Political Science Review*, 78(4), 234-250.
- Smith, R. (2019). *Interest Groups and Political Influence: A Study of Democracy in Action*. Boston: Harvard University Press.
- Taylor, S. (2020). *The Role of Information in Political Decision-Making*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press
- Teniwut, Meilani (15.9.2024). Ciri, Tantangan, dan Daftar 10 Negara Demokrasi Terbesar di Dunia. Reference list: Electronic sources (web publications). Retrieved 25 January, 2025, from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/701323/ciri-tantangan-dan-daftar-10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia>
- Thompson, L. (2023). Civil Liberties and Democratic Governance. *Journal of Human Rights*, 12(1), 45-67.
- Williams, T. (2022). Corruption and Its Impact on Democratic Institutions. *Governance Studies*, 10(2), 89-110.

BAB 6

DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP

Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.
Universitas Palangka Raya
E-mail: asepikbal@fkip.upr.ac.id

PENDAHULUAN

Kecintaan kita kepada Indonesia bukan hanya melulu karena keindahan dan sumber daya alam yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita ini, tetapi tentang bagaimana kita mampu memahami sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia hingga sampailah pada saat seperti sekarang, Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, penjajahan menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya demokrasi dalam alam kehidupan Indonesia karena agenda kolonialisme salah satunya adalah deedukasi (pembodohan) terhadap pribumi yang dijajah meskipun ketika zaman Gubernur Jendral Johannes Van Den Bosch sempat diberlakukan politik etis yang kemudian menjadi bumerang bagi kolonialisme di Indonesia.

Penjajahan mental berupa penindasan intelektual yang dilakukan oleh penjajah menjadi salah satu taktik strategis agar rakyat Indonesia tidak sempat berpikir dan sadar untuk melawan. Artinya bahwa perlawanan terhadap penjajahan dalam berbagai babak sejarah termasuk revolusi Prancis yang bersumber pada kesadaran dan intelektualitas. Kesadaran dan intelektualitas yang baik dari warga negara di suatu negara yang akhirnya membawa banyak negara meninggalkan pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis dimana “akal sehat” menjadi pusat peradaban demokrasi. Alami (2016) memandang bahwa demokrasi sebagai “*the rule of the*

people” dimana *people* atau rakyat harus tunduk pada rule atau peraturan, meskipun di satu sisi kita melihat demokrasi semacam teori perjanjian atau kontrak sosial yang dikemukakan oleh Rousseau (1986), namun alasan utama dari demokrasi bukan pesimisme manusia untuk mempertahankan kehidupan sehingga perlu untuk melakukan kontrak sosial, tapi alasan utama demokrasi adalah optimisme dimana kesepakatan dilakukan sebagai upaya dalam membangun negara dan kehidupan rakyat yang lebih baik.

Secara universal, demokrasi selalu menitikberatkan pada kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan pemerintah dibentuk sebagai “suatu perwakilan” rakyat untuk mengurus negara dan memajukan kesejahteraan bersama. Di dalam buku *Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Hatta (2018, hlm. 10) mengungkapkan bahwa syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia pascakemerdekaan adalah bagaimana menjadikan kebenaran dan kebaikan sebagai dasar kedaulatan rakyat untuk mencapai Indonesia yang mulia dan rakyatnya yang makmur. Kebenaran dan kebaikan (kearifan) dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menjadi sesuatu yang terdengar mudah namun dalam pengimplementasiannya tentu sangat sulit. Penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) pada tingkatan elit politik serta acuh tak acuh atau kesadaran politik yang rendah (*unconsciousness politic*) pada kalangan masyarakat, menjadikan praktik demokrasi tidak dapat terimplementasikan secara ideal.

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai demokrasi secara kontekstual dilaksanakan pada dua kehidupan di dalam suatu negara, pertama dipahami, diyakini dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Demokrasi dalam pemerintahan tidak dilihat dari hasil akhir melainkan dilihat dari

tua, keluarga, guru, masyarakat dan sebagainya untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Dengan internalisasi demokrasi sejak dini, maka potensi terjadinya intoleransi yang dilakukan oleh seseorang cenderung lebih kecil.

KESIMPULAN

Demokrasi sebagai sikap hidup tidak serta merta dapat terwujud secara alamiah melainkan perlu intervensi atau upaya dari orang tua, guru maupun unsur lainnya. Menjadikan demokrasi sebagai sikap hidup juga bukan hanya soal pengetahuan saja, melainkan sebagai hasil dari upaya penumbuhan sikap. penerapan nilai dan prinsip demokrasi sebagai sikap hidup dapat dilakukan pada lingkup keluarga sejak dini melalui hal-hal sederhana. Implementasi demokrasi sebagai sikap hidup kian menghadapi tantangan di era perkembangan teknologi yang semakin pesat antara lain dengan semakin tingginya individualisme, polarisasi kelompok dan intoleransi. Upaya menginternalisasikan nilai dan prinsip demokrasi serta pengajaran berharga lainnya menjadi upaya nyata yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut sehingga potensi dari individualisme, polarisasi kelompok serta intoleransi dapat semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, K. (2022). Dampak Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Karyawan Dan Turnover Intention (Studi Kasus Pt Bank Xyz Tbk). *Jurnal Bina Manajemen*, 10(2), 42-63.
- Ammang, W., Sondakh, M., & Kalesaran, E. R. (2017). Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Perilaku Merokok Pada Anak Usia Remaja (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Makassar Timur Kota Ternate). *Acta Diurna Komunikasi*, 6(1).

- Anderson, L.W., dan Krathwohl, D.R. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educationl Objectives*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Hakim, Abdul Aziz. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustakapelajar: Yogyakarta
- Hasanah, U., Arista, I., & Silitonga, M. (2020). Komunikasi Dalam Keluarga dan Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 74-83.
- Hatta, Mohammad. (2018). *Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. SEGA ARSY: Bandung
- Hendri, E., Purnaningsih, N., & Saleh, A. (2014). *Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan pembangunan* (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University).
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/7-penyimpangan-yang-terjadi-pada-masa-demokrasi-terpimpin-22TSPjdsLaf?>
- Irwanto, N., dan Suryana, Y. (2016). *Kompetensi Pedagogik*. Surabaya: GentaGroup Production.
- Jensen, S. M., & Luthans, F. (2006). Entrepreneurs as authentic leaders: Impact on employees' attitudes. *Leadership & Organization Development Journal*, 27(8), 646-666.
- Mulyadi, M. (2018). *Falsifikasi demokrasi: berpikir ulang demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- Pratiwi, N. M., & Manafe, L. A. (2022). Gaya Kepemimpinan Demokratis dalam Memotivasi Kinerja Karyawan. *Jurnal Visionida*, 8(1).
- Ringo, R. L. S., Rosadi, D., & Wirawan, I. G. N. P. D. (2020). Pengaruh Komunikasi Terbuka Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 110-118.
- Rousseau, Jean Jacques. (1986). *Kontrak Sosial*, terj. Sumardjo, Jakarta : Erlangga
- Sabarua, J. O., & Mornene, I. (2020). Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak. *International Journal of Elementary Education*, 4(1), 83-89.
- Safitri, D., & Diana, R. R. (2023). Pendidikan Akhlak dalam Keluarga (Studi Kasus Pola Asuh Orang Tua dalam Internalisasi Akhlak Anak Usia Dini). *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6439-6452.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58.
- Thalhah, H. M. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 413-422.
- Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945
- Winarno, Budi. (2017). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

BAB 7

DEMOKRASI DALAM PIAGAM MADINAH

Yaya Mulya Mantri, S.Hum., M.Sc.
Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung
E-mail: yaya.mulyamantri@poljan.ac.id

PENDAHULUAN

Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dokumen ini diakui sebagai salah satu konstitusi pertama dalam sejarah, yang mengatur hubungan antara muslim dan nonmuslim di Madinah, serta menciptakan kerangka kerja untuk kehidupan sosial, politik, dan hukum di kota tersebut (Ahmad, 2014). Piagam Madinah, menurut Jimly Ashiddiqie, adalah konstitusi modern pertama di dunia yang disusun berdasarkan kesepakatan tertulis oleh warga Madinah. Dokumen ini ditandatangani oleh 13 komunitas, termasuk kaum Mukmin dan Muslim dari Mekkah dan Yastrib, serta enam kelompok Yahudi dari beberapa klan Banu dan suku lainnya (Ashiddiqie, 2004).

Berawal dari tahun 622 M, Nabi Muhammad dan para pengikutnya (Muslim) menghadapi penindasan yang semakin berat di Mekah. Mereka kemudian memilih untuk pindah ke Kota Yastrib (kemudian berganti nama menjadi Madinah). Nabi Muhammad dan pengikutnya diundang oleh suku-suku lokal untuk membantu menyelesaikan konflik di antara mereka. Setelah kedatangan Nabi, Madinah dihuni oleh berbagai suku, baik muslim (dari suku Aus dan Khazraj) dan nonmuslim (seperti Yahudi). Keberagaman ini menciptakan kebutuhan untuk menetapkan aturan dan ketentuan yang dapat

mengungkapkan kesepakatan bersama dan menciptakan stabilitas (al-Mubarakfuri, 2015).

Piagam Madinah ditulis sebagai sebuah dokumen perjanjian yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban antara berbagai kelompok, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku lokal lainnya, dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan kerja sama di dalam komunitas. Piagam ini memasukkan prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, menjelaskan tanggung jawab sosial, keamanan, dan saling menghormati antara anggota masyarakat yang berbeda keyakinan (Maryam, 2009). Dengan mengatur hubungan di antara berbagai elemen dalam masyarakat Madinah, Piagam Madinah menjadi landasan penting dalam pengembangan komunitas muslim yang inklusif dan demokratis, serta menjadi referensi bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari.

Seberapa pentingkah membahas aspek demokrasi dalam Piagam Madinah? Setidaknya ada lima alasan aspek demokrasi dalam Piagam penting untuk dibahas. *Pertama*, Piagam Madinah memiliki konsep perwakilan dan musyawarah. Piagam Madinah mengedepankan **prinsip musyawarah** dalam pengambilan keputusan. Dalam dokumen tersebut, terdapat elemen yang mencerminkan partisipasi anggota masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan penyelesaian konflik (Ahmad, 2014). Ini menciptakan kerangka untuk partisipasi kolektif yang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kedua, Piagam Madinah memiliki **pengakuan terhadap keragaman**. Piagam Madinah mengakui dan menghormati keberagaman etnis dan keagamaan di Madinah. Dengan menjamin hak-hak berbagai suku dan agama, piagam ini menciptakan suasana inklusif yang menjadi salah satu prinsip dasar demokrasi modern, di mana hak-hak individu dihormati

damai tanpa persetujuan dari muslim lainnya dalam kaitannya dengan perang di jalan Allah SWT; mereka harus bertindak bersama dan adil. Poin kesembilan menyebutkan bahwa jika ada yahudi yang bergabung dengan muslim, mereka berhak mendapatkan bantuan dan hak yang setara, serta tidak boleh mengalami penindasan atau diabaikan (Shobahah, 2019).

Poin kesepuluh menegaskan kewajiban sejumlah muslim untuk melindungi sesama Muslim agar darah mereka terjaga. Poin kesebelas menyebutkan bahwa orang-orang musyrik dilarang untuk melindungi harta benda kaum Quraisy dan tidak boleh menghalangi muslim. Poin kedua belas menjelaskan bahwa setiap orang yang membunuh muslim yang tidak bersalah harus menerima hukuman yang layak, kecuali jika pihak keluarga atau wali korban memilih untuk memaafkannya. Poin ketiga belas mengingatkan semua muslim agar tidak membiarkan saudara muslim yang dibunuh tanpa pembelaan dan diharuskan untuk membela mereka. Poin keempat belas menyatakan bahwa umat muslim dilarang untuk membantu atau melindungi orang jahat. Siapapun yang melanggar aturan ini akan menghadapi konsekuensi yang berat. Poin kelima belas mengungkapkan bahwa semua perselisihan, baik di antara muslim, antar nonmuslim, maupun yang melibatkan keduanya, harus diselesaikan dengan merujuk kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad (Shobahah, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A. (1956). *Membentuk Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Z. A. (2014). *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2015). *Sirah Nabawiyah*, prnj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al Kautsar.

- Ashiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: MKRI PSHTN FHUI.
- Firdaus. (2019). Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 72-81.
- Heldi, Fauzan, A. R., Ripdia, A. H., & Zahra, A. (2021). Demokrasi, Keadilan, dan Utilitarianisme dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 19 No. 1, 1-12.
- Ibnu Katsir, A. A. (2000). *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Maryam, S. (2009). *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Lesfi.
- Nafis, C. (2015). *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.
- Nasution, S. (2013). *Sejarah Perdaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Rasyid, M. N. (1997). *Seputar Sejarah & Muamalah*. Bandung: Al-Bayan.
- Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. *Ahkam*, Volume 7, Nomor 1, 195-214.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press.
- Tanjung, R. (2022). Piagam Madinah. <https://www.researchgate.net/publication/357416605>.

BAB 8

DEMOKRASI: PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Emillia, S.H., M.Kn.
Institut Teknologi PLN
E-mail: emillia@itpln.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau yang dihuni oleh penduduk dengan jumlah sebesar 278,8 juta jiwa pada tahun 2023 yang terus-menerus mengalami penambahan jumlah penduduk sesuai dengan data yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik. Sehingga negara Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 83.763 kelurahan/desa (Emillia, 2022). Tidak ada salahnya kita mengenal wilayah Indonesia sebagai latar belakang multikultural sebelum membicarakan konsep demokrasi. Berdasarkan posisi geografis maka Indonesia berada pada posisi koordinat 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BB. Berdasarkan kondisi ini Indonesia dipengaruhi iklim tropis yang terdiri atas musim kemarau dan musim penghujan. Demikian pula batas wilayah Indonesia meliputi pulau paling luar Indonesia yaitu pulau We yang terletak di ujung wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Pulau Rote berada di bagian selatan Nusa Tenggara dan Pulau Sumatera yang terletak di ujung utara serta Kota Merauke merupakan wilayah terluar bagian timur (Julismin, 2013).

Apabila ditinjau dari unsur penduduk maka penduduk Indonesia berlatar belakang multi-etnis yaitu 8 suku besar dan 772 suku kecil serta 746 bahasa daerah (Emillia, 2022). Dengan demikian Indonesia merupakan negara yang sangat unik sehingga dengan ciri khas inilah yang membedakan dengan

negara lain. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang kesukuan maka bangsa Indonesia memiliki keberagaman dan multikultur berdasarkan etnis dan kebahasaan. Bangsa Indonesia mengakui adanya perbedaan budaya. Perbedaan tersebut harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Disamping itu dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara multikultur yang dipertahankan menjadi tradisi secara turun temurun melalui kearifan lokal ini diwarnai pula dengan etika dan peraturan adat istiadat serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kesadaran beretika dan hukum.

Oleh karena itu apabila ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka kata “kearifan lokal” bersal dari dua suku kata yaitu kearifan (*wisdom*) yang berarti kebijaksanaan atau bijaksana dan lokal (*local*) yang berarti tempat, setempat. Sehingga *local wisdom* atau *local genius* dapat diartikan menjadi ide, nilai dan pandangan di wilayah setempat yang memiliki karakter bijaksana, arif dan adat istiadat yang serta kebiasaan yang baik yang merupakan tradisi yang diikuti masyarakat setempat (Njatrijani, 2018). *Local Genius* juga dapat ditafsirkan sebagai ciri khas budaya dan adat istiadat sehingga masyarakat dapat mengadopsi dan mengolah tradisinya tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, pengertian kearifan lokal adalah kemampuan sebuah bangsa untuk mengadopsi dan mempergunakan budaya dan tradisi bangsa lain menjadi ciri khas tradisinya sendiri. Sedangkan kearifan lokal apabila ditarik pengertian secara umum adalah budaya dan tradisi yang sudah diwariskan dan berkembang secara turun temurun oleh masyarakat setempat yang bersifat multikultural. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri khas sebuah bangsa yang multikultural adalah memiliki status peradaban yang tinggi seperti halnya dengan bangsa Indonesia (Hidayat, n.d.). Kepribadian bangsa

BAB 9

NILAI-NILAI DEMOKRASI

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
IPOSS Jakarta
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah konsep yang telah lama menjadi dasar dari sistem pemerintahan modern. Pengertian demokrasi bersumber dari bahasa Yunani yang bermakna "pemerintahan oleh rakyat." Dalam praktiknya demokrasi tidak hanya melibatkan pemilihan umum untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencakup serangkaian nilai dan prinsip yang mendasari seluruh struktur pemerintahan dan kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi meliputi kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kebebasan adalah salah satu pilar utama demokrasi. Kebebasan dalam konteks demokrasi berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat, beragama, berkumpul, dan berorganisasi tanpa takut akan represi atau intimidasi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Kebebasan ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan diskusi terbuka dan debat publik, yang esensial dalam rangka pembuatan keputusan yang semakin baik serta semakin berkeadilan.

Kesetaraan juga merupakan nilai fundamental dalam demokrasi. Kesetaraan dalam demokrasi bermakna bahwa tiap-tiap individu tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, ataupun etnis mempunyai hak yang setara pada proses perpolitikan. Hal ini meliputi hak dalam memilih atau dipilih, beserta hak dalam memperoleh perlakuan yang berkeadilan di

mata hukum. Kesetaraan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang mendominasi atau mendiskriminasi kelompok lain sehingga semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan secara setara.

Partisipasi adalah aspek lain yang krusial dalam demokrasi. Partisipasi berarti peran serta aktif warga negara pada proses perpolitikan baik dengan mekanisme pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi publik, ataupun dalam bentuk keterlibatan lain seperti menjadi anggota organisasi masyarakat sipil. Partisipasi aktif dari warga negara memastikan bahwa pemerintah tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Akuntabilitas adalah prinsip penting lainnya dalam demokrasi. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Pejabat publik harus transparan dalam pengambilan keputusan dan siap untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan masing-masing kepada publik. Akuntabilitas ini menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik.

Nilai-nilai demokrasi ini mendasari sistem pemerintahan yang memberikan suara kepada setiap individu, memungkinkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dalam konteks politik, nilai-nilai ini menciptakan sistem yang semakin adil dan merata, di mana masing-masing orang mempunyai peluang yang setara dalam berkontribusi serta mempengaruhi kebijakan publik.

Namun demikian nilai-nilai demokrasi tidak sekedar penting pada konteks politik, tapi mempunyai pula dampak luas pada aspek sosial, perekonomian, serta kebudayaan. Dalam bidang sosial, nilai-nilai demokrasi memacu penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan individu, serta

sebagai panduan moral yang berkelanjutan untuk mempromosikan keadilan dan keterlibatan aktif warga dalam proses politik. Evolusi nilai-nilai ini menggambarkan daya tahan dan relevansi universal dalam menanggapi tantangan zaman. Adaptasi dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan ini tetap relevan dan efektif. Hanya dengan menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif, akuntabilitas, keadilan, dan kebebasan, dapat dibangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan stabil di era yang terus berubah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P. (2022) 'Decolonization and the Spread of Democratic Ideals', *Journal of Global Politics*, 61(5), pp. 405–426.
- Brown, A. (2019) 'The Evolution of Democratic Values: From Ancient Greece to the 21st Century', *International Journal of Democracy Studies*, 38(4), pp. 567–589.
- Dahlberg, S. (2019) 'Democratic accountability and the politics of misinformation', *Journal of Political Communication*, 36(3), pp. 330–346.
- Garcia, M. (2022) 'Government Accountability and Democratic Integrity', *Journal of Public Administration*, 37(1), pp. 67–89.
- Green, S. (2021) 'The Impact of Digital Technology on Democratic Participation', *Journal of Communication Studies*, 39(6), pp. 87–109.
- Johnson, L. (2021) 'Democratic Values and Practices in Contemporary Politics', *Global Democracy Review*, 55(2), pp. 76–98.

- Kim, H. (2021) 'Equality in Democratic Societies: Challenges and Solutions', *International Journal of Social Equality*, 44(3), pp. 233–254.
- Lopez, D. (2020) 'Freedom and Democracy: A Symbiotic Relationship', *Journal of Human Rights and Democracy*, 34(2), pp. 145–167.
- Nguyen, T. (2023) 'Political Participation and Democratic Health', *Journal of Political Engagement*, 52(4), pp. 98–119.
- Phillips, A. (2020) *Democracy and Equality: The Enduring Challenge of Class*. Princeton University Press.
- Rosenberg, M. (2019) 'Historical Perspectives on Democracy: A Comparative Analysis', *Journal of Historical Studies*, 29(1), pp. 204–225.
- Schama, S. (2019) *Citizens: A Chronicle of the French Revolution*. Penguin.
- Smith, J. (2020) 'Democracy in the Modern Era: Challenges and Opportunities', *Journal of Political Science*, 45(3), pp. 123–145.
- Sunstein, C.R. (2019) *How Change Happens*. MIT Press.
- Verba, S., Schlozman, K.L. and Brady, H.E. (2020) *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Williams, R. (2020) 'Revolutionary Changes and Democratic Values', *American Journal of Political History*, 47(3), pp. 301–322.

BAB 10

PENDIDIKAN DEMOKRASI

Dra. Darmawati, M.Pd.
Universitas Megarezky Makassar
E-mail: darmawatimrs@unimerz.ac.id / darmawatimrs@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani kuno "*demos*" (rakyat) dan "*kratos*" (pemerintahan) diartikan sebagai "pemerintahan rakyat" atau "kekuasaan rakyat," menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Demokrasi telah menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia, terus berkembang dan berubah seiring dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Pada era modern, demokrasi tidak hanya dipandang sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang menjiwai tata kelola negara serta kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia dengan keragaman budaya, agama, dan suku, demokrasi memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar kehidupan bernegara, keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan pengakuan hak asasi manusia. Demokrasi memastikan setiap suara diakui dan setiap kelompok diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi juga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan negara.

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah berhasil menjalani beberapa

pemilihan umum yang relatif bebas dan adil. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius yaitu munculnya isu-isu seperti intoleransi, disinformasi, polarisasi politik, ancaman terhadap kebebasan pers, dan praktik korupsi. Untuk itu, pendidikan demokrasi menjadi sangat penting dalam memperkuat pemahaman, sikap, dan keterampilan berdemokrasi, khususnya bagi generasi muda. Melalui pendidikan demokrasi, diharapkan dapat tercipta warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta aktif dalam berbagai proses demokrasi. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam mengevaluasi kebijakan publik dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan berdaya.

Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian ini sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menyatakan bahwa "*Democracy is the government from the people, by the people, and for the people.*" Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Kusumawardani, Sri Suning dkk., 2024). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi yang diwujudkan melalui mekanisme partisipasi langsung maupun perwakilan. Prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintah memperoleh legitimasi dari rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan terbuka, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2.

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan

Dengan menjamin hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta menghormati keberagaman, demokrasi menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

Sejarah demokrasi menunjukkan perkembangan dari demokrasi langsung di Athena hingga demokrasi perwakilan modern. Di Indonesia, demokrasi telah berkembang melalui berbagai fase mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Era Reformasi sejak 1998 menandai revitalisasi demokrasi dengan desentralisasi kekuasaan, pemilu langsung, dan peningkatan kebebasan sipil. Meskipun ada tantangan, demokrasi Indonesia terus berkembang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan demokrasi bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan agar individu dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengalaman langsung dan pendidikan inklusif, pendidikan demokrasi membentuk warga negara yang menghargai perbedaan dan bertanggung jawab. Pendidikan demokrasi yang prioritas akan mewujudkan demokrasi yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim dkk.(2023).Pendidikan Pancasila Berbasis Kebhinnekaan Indonesia untukPerguruan Tinggi. Bandung: Refika Aditama.
- Alwi Kaderi.(2015). Pendidikan Pancasila untuk PerguruanTinggi. Banjarmasin: Antasari Press.
- Darmawati, dkk. (2024). Pancasila Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi. Malang Jatim: Future Science.
- Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan.

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia.(2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib
Umum Pendidikan Pancasila.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia.(2013). Materi Ajar Mata Kuliah
Pendidikan Pancasila.
- Fuady, Munir (2010) Konsep Negara Demokrasi. Bandung: PT
Refika Aditama.
- Gutmann, A. (1987). Democratic Education. Princeton:
Princeton University Press.
- Hatta, M. (1960). Demokrasi Kita. Jakarta: Penerbit Bulan
Bintang.
- Kaelan,M.S.(2018). Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur,
Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasi). Yogyakarta:
Penerbit Paradigma.
- Kusumawardani, Sri Suning dkk. (2024) Buku Ajar Mata Kuliah
Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi.
- Mahfud (2003) Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi
tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
- Mufti, Muslim dan Naafisah, Didah Durrotun (2013) Teori-
Teori Demokrasi: Bandung: CV Pustaka Setia.
- Udin Winataputra (2012) Pendidikan Kewarganegaraan dalam
Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa.
Bandung: Widya AksaraPress.

UU RI 2003 Nomor 20, Sistem Pendidikan Nasional.

UU RI 2012 Nomor 12, Pendidikan Tinggi.

Satrio Wahono dan Serlika Aprita. (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Kencana.

Soekarno. (1945). Lahirnya Pancasila. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Widodo, Slamet (2021) Pendidikan Kewarganegaraan Konsep dan Praktik Menjadi Warga Negara Baik dan Berintegritas. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Winarno (2023) Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Jakarta: PT Bumi Aksara.

BAB 11

MASA DEPAN DEMOKRASI

Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.
Universitas Pendidikan Nasional
E-mail: iga_dewi@undiknas.ac.id

PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi yang mengedepankan nilai kebebasan dan demokrasi. Orde Reformasi telah memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat kepada pemerintah. Pada Orde Reformasi, rakyat menempati posisi penting dalam proses pembangunan, dan tidak jarang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Teori kedaulatan sendiri menyebutkan rakyat adalah pemegang/pemilik kekuasaan tertinggi sebuah negara (Munawaroh, 2024). Partisipasi rakyat diperlukan untuk menjamin bahwa pemerintah benar-benar menjalankan fungsi yang diamanahkan UUD'45. Bahkan ada yang menyebut bahwa tidak adanya partisipasi rakyat, hasil pembangunan tidak akan tercapai optimal (Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, 2022). Orde Reformasi memberikan angin segar kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam menyuarakan kepentingan mereka. Pemerintah Indonesia diharuskan bertransformasi dengan perubahan yang ada, terutama kepemimpinan yang dulunya bersifat otoritarian ke demokratis.

Salah satu sistem kepemimpinan yang harus dijaga konsistensinya oleh pemerintah Indonesia adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi saat ini sudah diadopsi oleh sebagian besar negara di berbagai penjuru dunia. Menurut survei yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consulting, 70,4% masyarakat Indonesia memandang sistem demokrasi

adalah sistem pemerintahan terbaik (Saiful Mujani Research & Consulting, 2023). Sistem demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi tiap individu untuk mengekspresikan diri tanpa harus takut akan berbagai perbedaan yang ada ditengah masyarakat. Sistem demokrasi seolah-olah menjadi primadona yang diidam-idamkan tiap negara agar mampu bergaul dengan negara maju lainnya di forum internasional. Tiap pemimpin negara memandang perlu mengadopsi sistem tersebut, untuk menunjukkan komitmen negara melindungi kebebasan dan hak asasi manusia.

Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Perbedaan (*difference*) adalah kata kunci dalam menjalankan komitmen menjadi negara demokratis. Salah satu tolok ukur demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) dalam memilih Presiden, Kepala Daerah maupun anggota legislatif pusat dan daerah. Demokrasi sendiri pertama kali diperkenalkan pada masa Yunani Kuno pada abad ke-6 dan abad ke-3 SM. Sistem pemerintahan ini sudah dikenal sangat lama, tidak heran sistem ini menjadi sistem yang banyak dianut negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Yunani sendiri sistem demokrasinya dilakukan secara langsung, dimana pemerintah membuat keputusan politik dan dijalankan oleh rakyatnya (Ayu, 2023).

Sistem demokrasi itu sendiri menghadapi berbagai tantangan, yaitu dengan munculnya Paus yang berusaha mendominasi kekuasaan pemerintahan. Inilah awal mula yang menjadi penyebab beberapa negara barat menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara. Hingga saat ini demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya yang berasal dari internal. Penyebab matinya sistem demokrasi itu sendiri ada yang disebabkan oleh resiliensi otoriter, yaitu pola kepemimpinan otoritarian yang tidak memberikan ruang untuk

pejabat negara tersebut menjadi cerminan bahwa kualitas demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedural belum substansial.

KESIMPULAN

Kondisi sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia memang masih jauh dari harapan, dan cenderung memprihatinkan. Sistem demokrasi Indonesia masih tergolong demokrasi semu yang hanya dijalankan untuk memenuhi tuntutan aturan atau perundang-undangan tanpa menitikberatkan pada kualitas dan komitmen pejabat publik dalam menjalankan tugas bernegara sesuai nilai falsafah Pancasila. Sistem demokrasi Indonesia juga masih bersifat sebatas demokrasi prosedural dan minim demokrasi substansial. Negara selama ini hadir hanya untuk memenuhi kewajiban Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh masalah keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demokrasi yang baik tidak hanya melihat kualitas pemerintahnya saja, namun juga melihat kualitas masyarakatnya. Masyarakat harus berada pada garda terdepan untuk mengaspirasikan segala kebutuhan yang mereka perlukan demi pencapaian tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, N. (2023, October 24). Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Dunia Beserta Pengertiannya. detik.com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6998129/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-dunia-beserta-pengertiannya>
- bps.go.id. (2024). Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>

- Hamdi. (2013). Ketua MK: Demokrasi Indonesia Belum Menyentuh Aspek Substansial. MKRI.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8875>
- IndonesiaBaik.id. (2024). Semangat Berbenah! Indeks Persepsi Korupsi Belum Membaik. Facebook.com. <https://www.facebook.com/IndonesiaBaikId/posts/semangat-berbenah-indeks-persepsi-korupsi-belum-membaiktransparency-international/721476090170019/>
- Kaisiepo, M. (2024). Otokrasi Elektoral dan Demokrasi "Cacat". Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/11/otokrasi-elektoral-dan-demokrasi-cacat>
- Lanten, N. (2023). Penurunan Indeks, Kemendagri: Demokrasi Indonesia Masih Cacat. TribunNews.com.
- Margiansyah, D. (2021). Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki. JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik), 11(2), 263–300. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
- Munawaroh, N. (2024, September 17). Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73/#>
- Saiful Mujani Research & Consulting. (2023, June 1). Sebanyak 70,4 Publik Menganggap Demokrasi adalah Sistem Pemerintahan Terbaik, Tapi Hanya 58,9 Persen yang Puas pada Jalannya Demokrasi. Saifulmujani.com. <https://saifulmujani.com/sebanyak-704-publik-menganggap-demokrasi-adalah-sistem-pemerintahan-terbaik-tapi-hanya-589-persen-yang-puas-pada-jalannya-demokrasi/>
- Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan. (2022, March 25). Keterlibatan Peran Masyarakat Diperlukan

dalam Perencanaan Pembangunan. PekalonganKota.go.id.
<https://pekalongankota.go.id/berita/keterlibatan-peran-masyarakat-diperlukan-dalam-perencanaan-pembangunan.html>

Wahid, H. (2020). Demokrasi Vs Korupsi.
nasional.kompas.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/02/0233951/demokrasi-vs-korupsi?page=all>

Warsa, K. (2024). Demokrasi Bukan Sekadar Angka.
radarsukabumi.com.
<https://radarsukabumi.com/rubrik/artikel/demokrasi-bukan-sekadar-angka/>

PROFIL PENULIS



Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah dari pasangan Soewasono dan Sri Mariyati (alm), pada tanggal 29 Januari 1976, anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, merupakan Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Niaga Universitas Surakarta tahun 2000, S1 Ilmu Hukum tahun 2009 di Universitas Surakarta, S2 Ilmu Hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta tahun 2009 dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2023.



Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.

Norman adalah seorang peneliti di Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia. Penelitiannya berfokus pada Pemuda, Transformasi Digital, Modal Manusia, dan Masa Depan Dunia Kerja. Ia meraih gelar Magister Ekonomi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2016 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014.



Dudih Sutrisman, S.Pd., M.Sos.

Dudih merupakan PNS dengan jabatan fungsional Analis Kebijakan pada Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional RI, Jakarta. Penulis menempuh pendidikan jenjang S1 pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, lulus pada tahun 2015. Pendidikan jenjang S2 ditempuh pada program studi Magister Ilmu Politik (MIP), Universitas Nasional (Unas) Jakarta, lulus pada tahun 2023. Dudih merupakan alumni

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI pada tahun 2022. Dudih aktif menjadi Praktisi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Kebijakan Publik, serta aktif menjadi pengurus pada beberapa organisasi. Ia berhasil meraih Penghargaan Pegawai Teladan Lemhannas RI tahun 2023, narasumber berbagai kegiatan yang bertemakan kebangsaan, serta telah menerbitkan buku yang berjudul “*Mengenal Sejarah Sumedang-Ku*”, “*Pendidikan Politik: Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*”, dan “*Dari Salakanagara hingga Sumedang Larang: Histori Jawa Bagian Barat*”. Selain itu, Dudih turut menulis pada beberapa Buku Bunga Rampai seperti “*Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi*”, dan “*Pendidikan Politik*”.



Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.

Penulis merupakan seorang peneliti di IPOSS Jakarta. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di the University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati. Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*.



Aina Nurdiyanti, M.Pd.

Aina lahir di Sumedang, 1 April 1995. Telah menyelesaikan S1 dan S2 Pogram Studi Pendidikan Kewarganegraan di UPI. Saat ini bertugas sebagai dosen tetap Jurusan PGSD di Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2022. Bidang keahliannya adalah Pendidikan Demokrasi dan HAM. Ia aktif dalam pengajaran dengan menerapkan *case method* dan *Project Citizen* pada mata kuliah seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, serta Pendidikan Demokrasi dan HAM. Dalam penelitian, ia terlibat dalam riset pengembangan pembelajaran PKn SD dengan pendanaan mandiri maupun hibah, serta mempublikasikan karya di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan prosiding nasional. Selain itu, ia menulis *book chapter*, berkontribusi dalam buku kolaborasi, dan membimbing mahasiswa menghasilkan karya ilmiah serta media pembelajaran berpaten HaKI. Di bidang pengabdian, Aina aktif menjadi pembicara dalam *workshop* guru dan diseminasi media pembelajaran PKn. Saat ini, ia juga bertugas sebagai tim *taskforce* penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Akreditasi Prodi S1 PGSD FIP UNG.



Asep Ikbal, S.Pd., M.Pd.

Asep Ikbal, lahir di Bekasi, Jawa Barat pada 21 Mei 1993. Telah lulus S1 dan S2 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Asep pernah bekerja sebagai guru pada jenjang SMP dan SMA Sejak 2017 dan saat ini aktif bertugas sebagai dosen di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Palangka Raya. Jejak langkahnya dalam kehidupan mahasiswa yaitu sebagai aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi Ketua Umum BEM Himpunan Mahasiswa Civics Hukum (BEM HMCH), telah membawanya ke dunia intelektual dan memilih untuk menjadi akademisi. Selain aktif menulis sejak mahasiswa di media masa, penulis juga aktif menulis artikel ilmiah dan buku. Beberapa buku yang ditulisnya antara lain HMI Disruptif (2021), Pendidikan Pancasila Untuk SD/MI Kelas 1 Kelas 4 (2022) serta Pendidikan Pancasila Untuk SD/MI Kelas 2 dan Kelas 5 (2023), HMI Disruptive dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dalam

Kajian Nilai Sosial Spiritual serta buku Gagasan-gagasan Alternatif Sosial, Pendidikan dan Politik (GASPOL) pada tahun 2024.



Yaya Mulya Mantri, S.H., M.Sc.

Yaya lahir di Bandung, 6 November 1988 merupakan seorang penulis dan dosen yang aktif dalam bidang pendidikan dan literasi. Ia telah menyelesaikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan, S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang menyelesaikan S3 Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta. Yaya pernah mengajar di Politeknik Piksi Ganesha Bandung sejak tahun 2014 hingga 2022. Saat ini, ia bekerja di Politeknik Pajajaran Bandung. Yaya dikenal sebagai penulis dengan beberapa karya yang inspiratif, di antaranya yaitu buku *Bangkitkan Semangat Ciptakan Peluang* (2021), *Siapa Hadapi New Normal di Era Digital* (2022) dan *Aliran-aliran Pemikiran Kewarganegaraan berdasarkan Filosofis, Teoretis dan Praksis* (2025).



Emillia, S.H., M.Kn.

Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 1971. Telah menyelesaikan S1 Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1994. S2 Kenotariatan dan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Emillia mengawali karier di beberapa konsultan hukum kemudian berpraktik sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor dan meneruskan kecintaannya di dunia pendidikan. Sejak 2004 mengajar sebagai dosen tetap di Institut Teknologi PLN Jakarta hingga dengan saat ini. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar, kongres Notaris dan PPAT, penelitian serta pengabdian masyarakat. Beberapa karya yang pernah diterbitkan dalam bentuk buku referensi yaitu *Etika BerPancasilais*, *Etika Menjadi Warga Negara*, *Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Etika Membentuk Karakter Warga Negara Milenial 4.0*, *Kewarganegaraan: Teoritis dan Praksis*, dan *PANCASILA: Kontekstualisasi, Rasionalisasi dan Aktualisasi*.



Dra. Darmawati, M.Pd.

Penulis merupakan seorang Dosen DPK yang dikaruniai dua anak dan dua cucu yang saat ini bertugas di sebuah PTS naungan LLDikti Wilayah IX Sulawesi. Lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 di Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia sudah mengabdikan diri di berbagai bidang pekerjaan mulai dari staf Kepegawaian Bagian Organisasi Setda Maros,

Dosen STKIP Cokroaminoto Palopo, Guru SMA Neg.1 Suppa Pinrang, SMA Neg. 1 Larompong Luwu, SMA Neg. 2 Maros, Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar, Pondok Pesantren Hj. Haniah Maros, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Maros 2008-2018, dan sekarang menjadi Dosen Tetap PTS naungan LLDikti Wilayah IX Sulawesi. Ia telah menulis antologi yang berISBN dengan judul: *Psikologi Pendidikan* (2024), *Pancasila Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi* (2024), *Perjuangan Antara Doa dan Kenyataan* (2024), *Kala Cinta Menyapa* (2023), *TTS Permainan Edukatif Yang Seru* (2023), *Arti Hadirmu* (2021), *Telaga Jiwa* (2020), *Daring Oh Daring* (2020), *Ramadhan Yang Dirindukan* (2020), *Kotak Pandora* (2020) dan *Never Give Up* (2019).



Dr. I.G.A.A.G. Dewi Sucitawathi P., S.Sos., M.Si.

Iga Dewi lahir di Denpasar, 13 Oktober 1987. Saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali. Telah menyelesaikan S1 Hubungan Internasional Universitas Jayabaya, S2 Hubungan Internasional Universitas Katolik

Parahyangan, dan S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga dengan peminatan Ilmu Politik. Beberapa penelitian dan publikasi yang telah dihasilkan seperti Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) DRPM Kemenristekdikti Tahun 2018 bertema “Eksistensi Politik Perempuan dalam Penanggulangan Bencana di Kota Denpasar”, publikasi di beberapa Jurnal Internasional Bereputasi, Jurnal Nasional Terakreditasi, dan Prosiding Internasional. Berpengalaman sebagai *editor* dan *reviewer* jurnal nasional, narasumber seminar nasional, *Best Presentation* dalam kegiatan ICOSAPS (*International Conference on Social and Political Sciences*) Tahun 2022, presenter

pada kegiatan *International Conference IAPA (Indonesian Association for Public Administration)* Tahun 2019, dan presenter pada kegiatan *National Conference SINAGARA (Konferensi Nasional Administrasi Negara)* Tahun 2019.

DEMOKRASI

TEORETIS DAN PRAKSIS

Buku Demokrasi: Teoretis dan Praksis menghadirkan kajian mendalam tentang demokrasi dari berbagai perspektif, baik secara konseptual, historis, maupun aplikatif. Dengan terdiri dari sebelas bagian, buku ini mengupas secara sistematis perkembangan demokrasi di dunia dan Indonesia, serta bagaimana demokrasi berperan sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik. Selain itu, demokrasi tidak hanya dibahas dalam tataran institusional, tetapi juga sebagai sikap hidup dan nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu keunikan buku ini adalah eksplorasi demokrasi dalam konteks Piagam Madinah, yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip demokratis telah dikenal sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Lebih jauh, buku ini mengkaji demokrasi dalam perspektif kearifan lokal, nilai-nilai demokrasi dan pentingnya pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda. Sebagai penutup, pembaca diajak untuk menelaah tantangan serta masa depan demokrasi di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang berkompeten di bidangnya, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta siapa pun yang ingin memahami demokrasi secara lebih luas dan mendalam.



FUTURE SCIENCE

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumbarsari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com



IKAPI
IKATAN PENELITI INDONESIA

No. 348/JTI/2022

ISBN 978-634-7216-06-9 (PDF)



9

786347

216069